



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5857-5874

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Tahun 2014-2018

Fendi Samadinata<sup>1✉</sup>, Ade Budi Setiawan<sup>2</sup>, Indra Cahya Kusuma<sup>3</sup>

Universitas Djuanda, Bogor

Email: [fendisamadinata@gmail.com](mailto:fendisamadinata@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah untuk memberikan masukan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada pemerintah daerah di masa yang akan datang. Objek penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah dengan analisis value for money. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis kepustakaan dan teknis dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi tahun 2014-2018 dikatakan Ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomis di bawah 100% yaitu kabupaten Bogor 89,25%, kabupaten Cianjur 92,45% dan kabupaten Sukabumi 85,69%. Dari segi efisiensi kinerja pemerintah daerah kabupaten Bogor dan Cianjur memiliki rata-rata rasio efisiensi kabupaten Bogor 87,16%, kabupaten Cianjur 82,84% di katakana cukup efisien. Lalu kabupaten Sukabumi 77,53% efisien. Lalu dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2014-2018 yaitu 101,99% yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah kabupaten Bogor selama tahun 2014-2018 sangat efektif. Dari segi efektivitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Cianjur dan Sukabumi memiliki rata-rata rasio efektivitas kabupaten Cianjur 99,40% dan kabupaten Sukabumi 99,70% yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah kabupaten Cianjur dan Sukabumi selama tahun 2014-2018 efektif.

Kata Kunci: *Pengukuran Kinerja Keuangan, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Pemerintah Daerah*

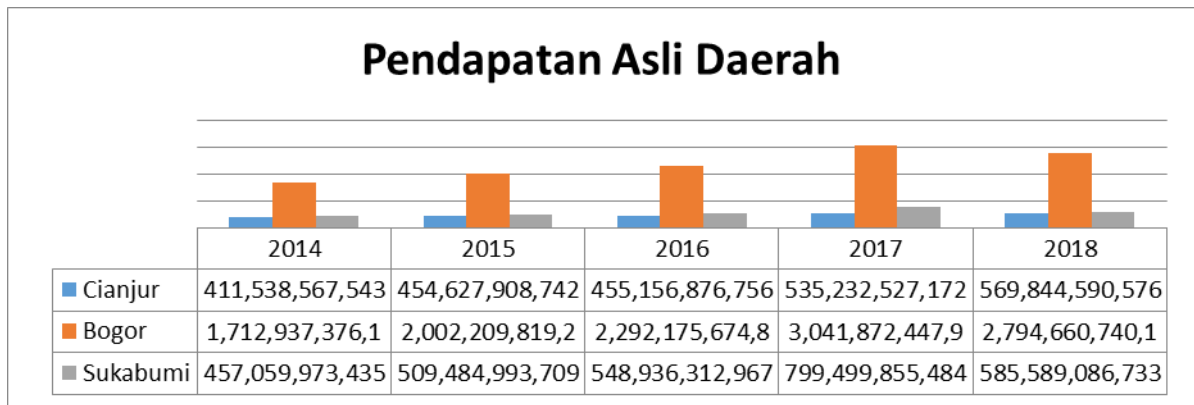
## Abstract

Performance measurement is the process of assessing work progress against predetermined goals and objectives. It is hoped that this performance measurement can become a consideration and recommendation for the government to provide input regarding the goals and targets that have been determined by the regional government in the future. The object of research is government financial performance using value for money analysis. Data collection was carried out using technical literature and technical documentation. The analysis technique used is financial ratio analysis, namely economics, efficiency and effectiveness. The results of data analysis show that the performance of the regional government of Bogor, Cianjur and Sukabumi Regency in 2014-2018 is said to be Economical because it has an average economic ratio below 100%, namely Bogor Regency 89.25%, Cianjur Regency 92.45% and Sukabumi Regency 85.69%. In terms of performance efficiency, the Bogor and Cianjur district governments have an average efficiency ratio of Bogor district of 87.16%, while Cianjur district is 82.84%, which is said to be quite efficient. Then Sukabumi district is 77.53% efficient. Then in terms of effectiveness, the average effectiveness ratio from 2014-2018 was 101.99%, which shows that the performance of the Bogor Regency regional government during 2014-2018 was very effective. In terms of performance effectiveness, the regional government of Cianjur and Sukabumi districts has an average effectiveness ratio of Cianjur district of 99.40% and Sukabumi district of 99.70%, which shows that the performance of the regional government of Cianjur and Sukabumi districts during 2014-2018 was effective.

Keywords: *Measuring Financial, Economic, Efficiency, Effectiveness, Performance of Regional Government*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat asset daerah terjaga juga keutuhannya. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu keberhasilan otonomi daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun (PP No.32 tahun 2004).



Gambar 1 Pendapatan Asli Daerah periode 2014-2018

Sumber : Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Barat, 2019

Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa pendapatan asli daerah pada 3 wilayah Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Bila dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya, PAD Kabupaten Bogor merupakan yang paling tinggi bahkan paling tinggi dibandingkan dengan 26 kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat. Diketahui bahwa PAD kabupaten Bogor yang tinggi berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain. Padahal, berdasarkan daerah otonomnya kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi mempunyai potensi yang lebih banyak dibandingkan kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan sumber daya alam kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi yang melimpah dibidang pertanian dan pariwisata. Namun ternyata wilayah yang disebutkan berpotensi tersebut pun bukan merupakan jaminan untuk kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang tinggi seperti kabupaten Bogor. Bahkan kabupaten Sukabumi dan kabupaten Cianjur disebut merupakan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah paling rendah. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengukur sejauh mana tingkat kemandirian suatu wilayah.

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi yang dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012). Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya (Hony, 2013). Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Penelitian ini di dukung oleh beberapa hasil penelitian dan salah satunya dari hasil penelitian Kusmila (2018), hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh kabupaten tidak

terdapat perbandingan pada kinerja keuangan yang di ukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Saputra, (2012), hasil penelitian menunjukkan : 1) rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) rasio efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecendrungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecendrungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecendrungan 116,2% dari tahun 2005-2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah yang diukur Berdasarkan Rasio Kemandirian, efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan keuangan daerah terhadap belanja daerah.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari subjek yang diteliti dan untuk mendapatkan informasi mengenai LAKIP dengan menggunakan tiga elemen penilaian yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagai bentuk penilaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi.

### Analisis Data

Analisis value for money pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) dalam tiga aspek yaitu ekonomi, efisien dan efektif terhadap penciptaan kinerja pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 1) Rasio Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2009) ekonomi adalah perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (spendingless). Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pengeluaran}} \times 100 \%$$

## Anggaran Pengeluaran

Tabel 1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Ekonomis
100% keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mohamad Mahsun 2006

### 2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tapi dalam bentuk relative karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan maka perbandingan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

- Meningkatkan input dan output yang sama.
- Meningkatkan output pada porsi yang lebih besar daripada porsi peningkatan input.
- Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- Menurunkan input dalam porsi yang lebih besar daripada porsi penurunan output.

Rumus rasio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efisien
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

### 3) Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rasio efektivitas dihitung dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Rasio Ekonomis Kabupaten Bogor

Pengukuran rasio ekonomis adalah untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam merealisasikan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran pengeluaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikatakan ekonomis jika rasio yang di capai <100%. Semakin rendah rasio ekonomis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 4.2 Rasio Ekonomis

Tahun	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran	Rasio Ekonomis	Kriteria
2014	2.066.097.590.811	1.758.322.200.942	85,10%	Ekonomis
2015	6.916.564.774.000	5.784.242.865.486	83,62%	Ekonomis
2016	7.167.373.099.000	6.630.400.553.876	92,50%	Ekonomis
2017	7.543.083.155.000	6.986.442.319.985	92,62%	Ekonomis
2018	7.812.021.914.000	7.219.006.604.022	92,41%	Ekonomis
	Rata-rata		89.25%	Ekonomis

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu berada pada *range* ekonomis karena berada pada rasio dibawah 100% yaitu 89.25% pada tahun 2014, 83,62% pada tahun 2015, 92,50% pada tahun 2016, 92,62% pada tahun 2017 dan 92,41% pada tahun 2018. Kemudian secara

keseluruhan dari tahun 2014 sampai 2018 rata-rata rasio ekonomis selama enam tahun terakhir sebanyak 89,25% dan ini di katakana ekonomis.

## 2. Rasio Efisiensi Kabupaten Bogor

Pengukuran rasio efisiensi adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam merealisasikan pengeluaran dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien jika rasio yang di capai < 100%. Semakin rendah rasio efisiensi maka maka menggambarkan kemampuan daerah dikatakan semakin baik.

Tabel 4.4 Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2014	1.758.322.200.942	2.059.879.339.749	85,36%	Cukup Efisien
2015	5.784.242.865.486	7.134.641.556.289	81,07%	Cukup Efisien
2016	6.630.400.553.876	7.323.216.347.020	90,54%	Kurang Efisien
2017	6.986.442.319.985	7.671.640.208.068	91,07%	Kurang Efisien
2018	7.219.006.604.022	8.224.347.591.426	87,78%	Cukup Efisien
	Rata-rata		87,16%	Cukup Efisien

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2015 berada pada *range* cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 87,73% pada tahun 2013, 85,36% pada tahun 2014 dan 81,07% pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2016 sampai tahun 2017 berada pada *range* kurang efisien karena berada pada rasio 90% - 100% yaitu 90,54% pada tahun 2016 dan 91,07% pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 kembali pada *range* cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 87,78%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efisiensi selama tahun 2014-2018 sebanyak 87,16% dan dikatakan cukup efisien.

## 3. Rasio Efektivitas Kabupaten Bogor

Pengukuran rasio efektifitas adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio

efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.

Tabel 4.3 Rasio Efektivitas

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2014	2.064.997.590.881	2.059.879.339.799	99,75%	Efektif
2015	6.916.564.774.000	7.134.641.556.289	103,15%	Sangat efektif
2016	7.167.373.099.000	7.323.216.347.020	102,17%	Sangat efektif
2017	7.543.083.155.000	7.671.640.208.068	101,70%	Sangat efektif
2018	7.970.998.760.000	8.224.347.591.426	100,18%	Sangat efektif
	Rata-rata		101,99%	Sangat efektif

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 berada pada *range* efektif karena berada pada rasio <100% yaitu 99,75%. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berada pada *range* sangat efektif karena berada pada rasio diatas 100% yaitu 103,15% pada tahun 2016, 102,17% pada tahun 2017, 101,70% pada tahun 2018, 100,18%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2014-2018 sebanyak 101,99% dan dikatakan sangat efektif.

#### 4. Rasio Ekonomis Kabupaten Cianjur

Pengukuran rasio ekonomis adalah untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam merealisasikan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran pengeluaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikatakan ekonomis jika rasio yang di capai <100%. Semakin rendah rasio ekonomis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 4.4 Rasio Ekonomis

Tahun	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran	Rasio Ekonomis	Kriteria
2014	2.821.243.467.694	2.640.348.488.429	93,59%	Ekonomis
2015	2.962.246.688.850	2.703.902.100.237	91,28%	Ekonomis
2016	3.167.735.144.967	2.908.919.130.797	91,83%	Ekonomis
2017	3.308.389.462.129	3.075.361.632.933	92,96%	Ekonomis
2018	3.643.327.728.775	3.373.828.600.631	92,60%	Ekonomis
	Rata-rata		92,45%	Ekonomis

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu berada pada *range* ekonomis karena berada pada rasio dibawah 100% yaitu 93,59% pada tahun 2014, 91,28% pada tahun 2015, 91,83 % pada tahun 2016, 92,96% pada tahun 2017 dan 92,60% pada tahun 2018. Kemudian secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai 2018 rata-rata rasio ekonomis selama enam tahun terakhir sebanyak 92,45% dan ini di katakan ekonomis.

#### 5. Rasio Efisiensi Kabupaten Cianjur

Pengukuran rasio efesiensi adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam merealisasikan pengeluaran dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien jika rasio yang di capai < 100%. Semakin rendah rasio efesiensi maka maka menggambarkan kemampuan daerah dikatakan semakin baik.

Tabel 4.5 Rasio Efesiensi

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2014	2.640.348.488.429	2.943.275.018.617	89,71%	Cukup Efisien
2015	2.703.902.100.237	3.313.270.042.205	81,61%	Cukup Efisien
2016	2.908.919.130.797	3.489.692.234.164	83,36%	Cukup Efisien
2017	3.075.361.632.933	3.864.468.768.212	79,58%	Efisien
2018	3.373.828.600.631	4.219.809.541.814	79,95%	Efisien
	Rata-rata		82,84%	Cukup Efisien

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio efesiensi pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2016 berada pada *range* cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 89,71% pada tahun 2014, 81,61% pada tahun 2015 dan 83,36% pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 berada pada *range* efisien karena berada pada rasio 60% -80%, yaitu 79,58% pada tahun 2017 dan 79,95% pada tahun 2018. Secara keseluruhan rata-rata rasio efesiensi selama tahun 2014-2018 sebanyak 82,84% dan dikatakan cukup efisien.

#### 6. Rasio Efektivitas Kabupaten Cianjur

Pengukuran rasio efektivitas adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan

Transper, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.

Tabel 4.6 Rasio Efektivitas

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2014	2.823.643.248.612	2.943.275.018.617	104,24%	Sangat efektif
2015	3.324.319.130.830	3.313.270.042.205	99,67%	Efektif
2016	3.649.933.285.047	3.489.468.234.164	95,61%	Efektif
2017	3.903.881.614.499	3.864.468.768.212	98,99%	Efektif
2018	4.284.370.974.875	4.219.809.541.814	98,49%	Efektif
	Rata-rata		99,40%	Efektif

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 berada pada *range* sangat efektif karena berada pada rasio >100% yaitu 104,24%. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2018 berada pada *range* efektif karena berada pada rasio diatas <100% yaitu 99,67% pada tahun 2015, 95,61% pada tahun 2016, 98,99% pada tahun 2017, 98,49% pada tahun 2018. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2014-2018 sebanyak 99,40% dan dikatakan Efektif.

#### 7. Rasio Ekonomis Kabupaten Sukabumi

Pengukuran rasio ekonomis adalah untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam merealisasikan pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran pengeluaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikatakan ekonomis jika rasio yang di capai <100%. Semakin rendah rasio ekonomis menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 4.7 Rasio Ekonomis

Tahun	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran	Rasio Ekonomis	Kriteria
2014	3.061.9653107.572	2.762.530.185.623	90,22%	Ekonomis
2015	3.254.514.235.700	2.897.354.181.462	89,03%	Ekonomis
2016	3.113.117.905.587	2.949.622.342.133	94,72%	Ekonomis
2017	3.493.291.638.177	3.133.366.931.396	89,70%	Ekonomis

2018	3.569.733.199.598	2.131.575.269.352	64,81%	Ekonomis
Rata-rata			85,69%	Ekonomis

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomis pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu berada pada *range* ekonomis karena berada pada rasio dibawah 100% yaitu 90,22% pada tahun 2014, 89,03% pada tahun 2015, 94,72% pada tahun 2016, 89,70% pada tahun 2017 dan 64,81% pada tahun 2018. Jadi secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai 2018 rata-rata rasio ekonomis selama 5 tahun terakhir sebanyak 85,69% dan ini di katakana ekonomis.

#### 8. Rasio Efisiensi Kabupaten Sukabumi

Pengukuran rasio efesiensi adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam merealisasikan pengeluaran dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien jika rasio yang di capai < 100%. Semakin rendah rasio efesiensi maka menggambarkan kemampuan daerah dikantakan semakin baik.

Tabel 4.8 Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2014	2.762.530.158.623	3.063.738.755.911	90,17%	Kurang Efisien
2015	2.897.354.181.462	3.492.840.609.744	82,95%	Cukup Efisien
2016	2.949.622.342.133	3.680.241.806.480	80,15%	Cukup Efisien
2017	3.133.366.931.396	4.026.245.447.355	77,82%	Efisien
2018	2.313.572.269.352	4.092.182.599.128	56,54%	Sangat Efisien
Rata-rata			77,53%	Efisien

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio efesiensi pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 pada *range* kurang efisien yaitu 90,17% karena berada di rasio 90%-100%, 2015 sampai tahun 2016 berada pada *range* cukup efisien karena berada pada rasio 80% - 90% yaitu 82,95% pada tahun 2015, 80,15% pada tahun 2016 dan 81,07% pada tahun 2017 bahwa *range* berada di posisi efisien yaitu 77,82% , dan pada tahun 2018 range berada di posisi sangat efisien yaitu 56,54 karena berada di rasio kurang dari 60%.

## 9. Rasio Efektivitas Kabupaten Sukabumi

Pengukuran rasio efektivitas adalah untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transper, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.

Tabel 4.9 Rasio Efektivitas

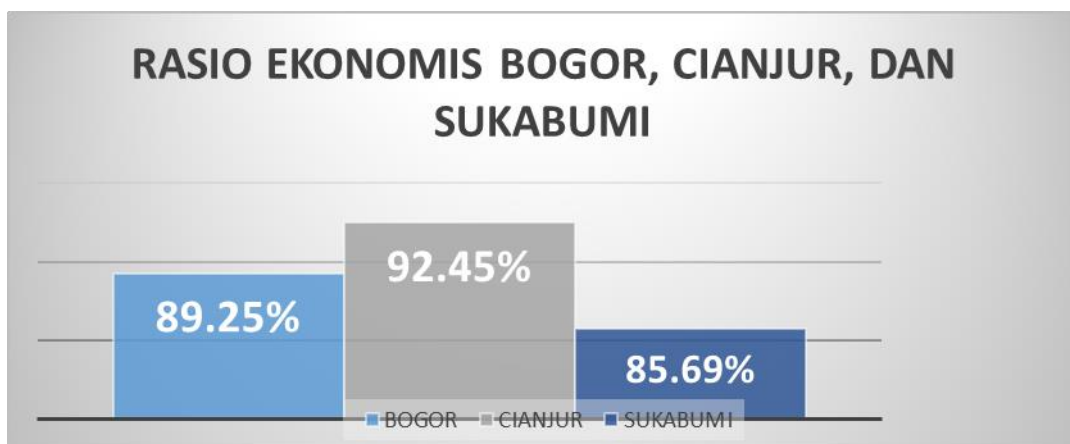
Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2014	3.093.935.579.680	3.063.738.755.911	99,02%	Efektif
2015	3.577.358.760.000	3.492.840.609.744	97,64%	Efektif
2016	3.568.389.579.000	3.680.241.806.480	103,13%	Sangat efektif
2017	4.063.182.335.602	4.026.245.447.355	99,09%	Efektif
2018	4.107.490.816.600	4.092.182.599.128	99,63%	Efektif
	Rata-rata		99,70%	Efektif

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2018 range yang hanya mendapatkan rasio sangat efektif ialah pada tahun 2016, yaitu 103,13% berada pada *range* sangat efektif karena berada pada rasio >100%. Kemudian pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 berada pada range efektif karena berada pada rasio 90%-100% , pada tahun 2014 berada pada range efektif yaitu 99,02%, di tahun selanjutnya 2015 yaitu 97,64%, di tahun 2017 berada di range efektif yaitu 99,09%, dan di tahun 2018 berada di range efektif yaitu 99,63%.

## Pembahasan Pembahasan Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi Tahun 2014-2018

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi berdasarkan pengukuran rasio ekonomis berada pada *range* ekonomis karna rata-rata rasio ekonomis Bogor sebanyak 89,25%, 92,45 % rata-rata rasio Cianjur, dan 85,69% rata-rata rasio Sukabumi, dan ini dikatakan ekonomis. Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010: 157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan dan hal ini terjadi pada setiap tahun. Dari data periode lima tahun tidak ada periode yang berada diatas 100%. Berarti setiap realisasi belanja selalu mencapai rencana anggaran belanja. Selain itu, dapat dilihat bagaimana rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi selama lima tahun tidak terlalu mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2014-2018, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi berdasarkan rasio ekonomis mengalami peningkatan kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Grafik perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kab. Bogor, Cianjur, dan Sukabumi 2014-2018

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

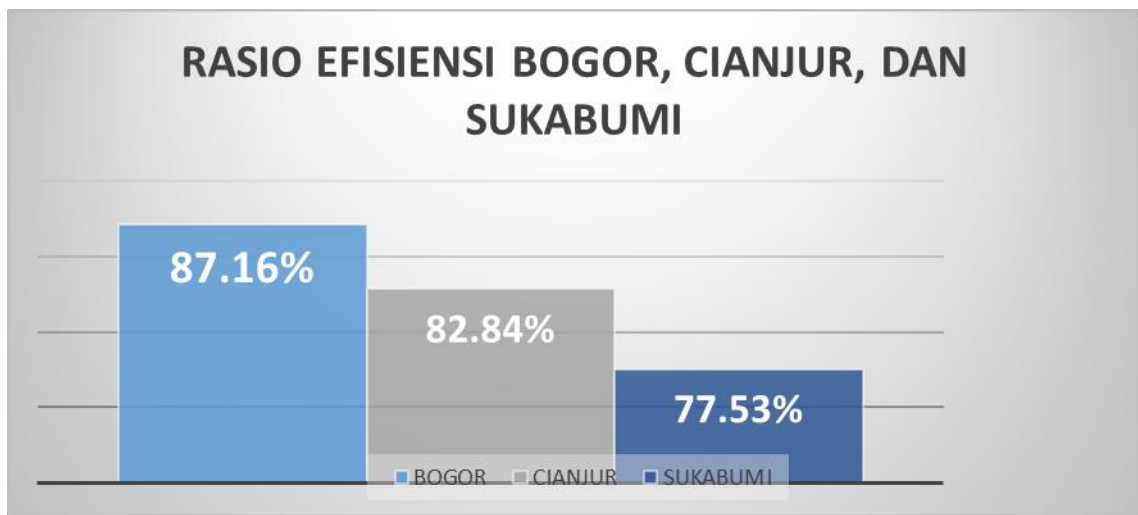
Dari grafik diatas dapat kita lihat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 adalah baik dan dikatakan ekonomis karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi berhasil menekan biaya realisasi pengeluaran sehingga realisasi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh Mulyadi (2010: 157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan dan hal ini terjadi setiap tahun selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018. didukung oleh penelitian Purnamasari (2019)

Untuk hasil analisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 dikatakan Ekonomis karena rata-rata perhitungan ekonomisnya dibawah 100% yaitu 89,25% pada Kabupaten Bogor, 92,45% pada Kabupaten Cianjur, dan 85,69% pada Kabupaten Sukabumi. Hal ini didukung oleh Mohamad Mahsun (2006), didukung oleh penelitian Zain (2016).

Untuk analisis perbandingan dari hasil pengukuran kinerja keuangan Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa dari ketiga perhitungan nilai ekonomis Kabupaten Bogor dikatakan ekonomis karena berhasil menekan anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran lebih rendah sehingga rata-rata nilai ekonomis pada tahun 2014-2018 yaitu 89,25%, kemudian perhitungan nilai ekonomis Kabupaten Cianjur dikatakan Ekonomis karena berhasil menekan anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran lebih rendah sehingga rata-rata nilai ekonomis dari tahun 2014-2018 yaitu 92,45%, dan Kabupaten Sukabumi dikatakan ekonomis karena berhasil menekan anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran lebih rendah sehingga rata-rata nilai ekonomis pada tahun 2014-2018 yaitu 85,69%. didukung oleh Mulyadi (2010: 157) pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan. Didukung oleh penelitian Jaenuri (2016).

#### Pembahasan Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2014-2018

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Cianjur, berdasarkan pengukuran rasio efisiensi dikatakan cukup efisien karna berada pada *range* dengan rata-rata > 80% yaitu : 82,84% pada kabupaten Bogor, 87,16% pada kabupaten Cianjur. Sedangkan kabupaten Sukabumi berada di rasio Efisien karena < 80% yaitu 77,53%. Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Berarti setiap realisasi belanja selalu dapat disesuaikan dengan realisasi pendapatan, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Cianjur berada di rasio cukup efisien dan Sukabumi berada di rasio efisien berdasarkan rasio efisiensi tiga kabupaten memiliki perbedaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3 Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi tahun 2014-2018

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa barat, 2020 (Data diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 adalah baik dan dikatakan cukup efisien karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Cianjur, kabupaten Sukabumi berada di rasio Efisien, ketiga kabupaten ini berhasil mengeluarkan biaya realisasi pengeluaran yang lebih kecil dari pada realisasi pendapatannya. Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010: 166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Oleh karna itu penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

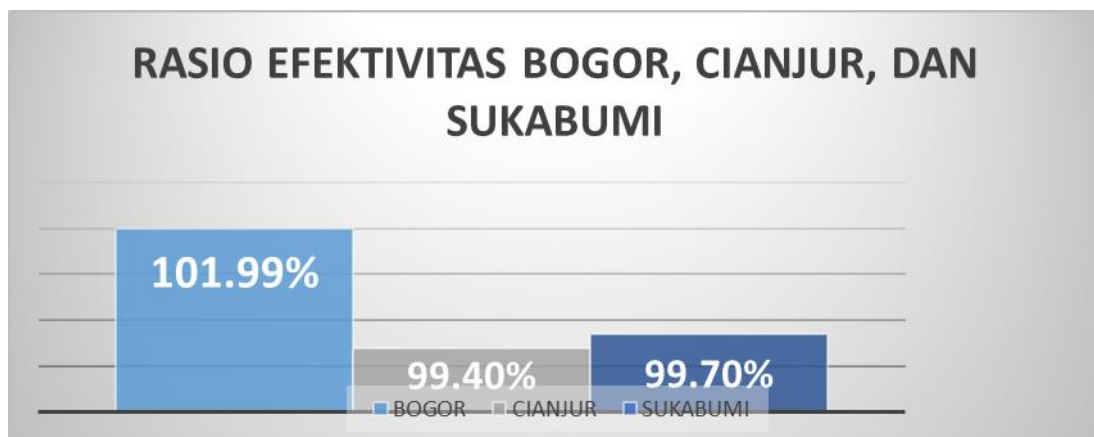
Untuk hasil analisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor dan Cianjur, pada tahun 2014-2018 Cukup Efisien karena rata-rata perhitungan Efisiensi diatas 80%-90% dikatakan Cukup Efisien yaitu 87,16% pada Kabupaten Bogor, 82,84% pada Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014-2018 Efisien karena rata-rata efisien diatas 60%-80% dikatakan Efisien yaitu 77,53% pada Kabupaten Sukabumi. Hal ini didukung oleh Kepmendagri, didukung oleh penelitian Zain (2016).

Untuk analisis perbandingan dari hasil pengukuran kinerja keuangan Daerah Kabupaten Bogor dan Cianjur, pada tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa dari kedua perhitungan nilai Efisiensi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dikatakan Cukup Efisien karena realisasi pengeluaran lebih rendah daripada realisasi pendapatan sehingga rata-rata nilai Efisiensi pada tahun 2014-2018 yaitu 87,16% pada kabupaten Bogor dan 82,84% pada

Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014-2018 perhitungan nilai Efisiensi yaitu 77,53% di katakana Efisien. didukung oleh Mulyadi (2010: 157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan. Didukung oleh penelitian Jaenuri (2016).

#### Pembahasan Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Tahun 2014-2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, Bogor menempati posisi sangat efektif berdasarkan rasio efektivitas berada pada *range* sangat efektif karna rata-rata rasionya adalah 101,99% . sedangkan Cianjur dan Sukabumi berada di range Efektiv dengan rasio >90%, 99,40% pada kabupaten Cianjur, dan 99,70% pada kabupaten Sukabumi, Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010: 137) yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan Dari data periode lima tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2014-2018, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan rasio efektivitas yaitu sangat efektif, dan Cianjur, Sukabumi berada di rasio efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4 Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintahan Dearah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Tahun 2014-2018

Sumber : BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2020 (Data diolah)

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tiga Daerah yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, pada tahun 2014-2018 adalah baik dan sangat efektif karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selalu mendapatkan realisasi pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan Kabupaten Cianjur dan Sukabumi berada di rasio Efektif, Hal ini di dukung pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010: 137) yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat

memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan dan hal ini bisa dibandingkan dengan tabel tingkat realisasi belanja.

Untuk hasil analisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor pada tahun 2014-2018 Sangat Efektif karena rata-rata perhitungan Efektivitas diatas 100% keatas dikatakan Sangat Efektif yaitu 101,99% pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Sukabumi pada tahun 2014-2018 Efektif karena rata-rata Efektivitas diatas 90%-100% dikatakan Efektif yaitu 99,40% pada Kabupaten Cianjur, 99,70% pada Kabupaten Sukabumi. Hal ini didukung oleh Kepmendagri, didukung oleh penelitian Zain (2016).

Untuk analisis perbandingan dari hasil pengukuran kinerja keuangan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa perhitungan nilai Efektivitas dikatakan sangat Efektif 100% keatas yaitu 101,99% pada kabupaten Bogor karena realisasi pendapatan lebih tinggi daripada anggaran pendapatan, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014-2108 bahwa perhitungan nilai efektivitas dikatakan Efektif yaitu 99,40% pada Kabupten Cianjur, dan 99,40% pada kabupaten Sukabumi. didukung oleh Mulyadi (2010: 157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan. Didukung oleh penelitian Jaenuri (2016).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi dengan menggunakan prinsip value for money dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rata-rata hasil analisis pencapaian sasaran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi tahun 2014-2018 dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran kinerja keuangan kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi mendapatkan realisasi pendapatan yang lebih besar dari pada pendapatan yang dianggarkan.
2. Hasil analisis pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi periode tahun 2014-2018 dalam pendekatan value for money dilihat dari rata-rata rasio ekonomis termasuk kedalam kriteria ekonomis, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi termasuk dalam kategori ekonomis.
3. Hasil Analisis Perbandingan dari hasil pengukuran kinerja keuangan menggunakan Value For Money pada pemerintah daerah kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Tahun 2014-2018 berdasarkan metode value for money kinerja pemerintah daerah kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi tahun 2014-2018, dengan menggunakan

teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada kategori ekonomis, yaitu 89,25%, 92,45% dan 85,69%. Rasio Efisiensi pada kabupaten Bogor dan Cianjur tahun 2014-2018 selalu mengalami baik yaitu 87,16%, 82,84% dan berada pada kategori cukup efisien. Pada kabupaten Sukabumi tahun 2014-2018 mengalami kurang baik yaitu 77,53% berada pada kategori efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Kusufi, (2012), Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Hony, (2013), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jaenuri, (2016), Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang tahun 2010-2014, Jurnal Ekonomi Pembangunan, ISSN: 2527-4023 Volume 14, Nomor 1, Juni 2016.
- Kusmila, Z., H. Mukhzarudfa, dan Y. Yudi, (2018), Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Jambi Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah, Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, Volume 3, Nomor 5, November 2018, pp. 27-39.
- Mardiasmo., (2009), Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi, (2018), Akuntansi Biaya, Edisi Ke-5, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Purnamasari, (2019), Analisis Pengeluaran Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Keuangan.
- Saputra, Dori, (2012), Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Akuntansi, Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Zain, (2016), Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Universitas Negeri Makassar, Makassar.

<http://bogorkab.go.id>

<https://cianjurkab.go.id>